



KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS

Widdy Yuspita Widiyaningrum

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
widdyypuspita80@gmail.com*

*Received: 20 Desember 2020; Revised: 26 Desember 2020; Accepted: 3 Januari 2021; Published:
Januari 2020; Available online: Januari 2021.*

ABSTRAK

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi yang merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Daerah, Strategi AURA

ABSTRACT

The Regional Head is a figure or manager who determines the effectiveness of achieving the goals of the regional government organization. The process of governance in the regions is synergistically determined by the extent of the role played by the Regional Head. In other words, the direction and objectives of regional government are determined by the ability, competence and capability of the Regional Head in carrying out administrative/ managerial functions, leadership, services and other tasks which are the obligations and responsibilities of the Regional Head. The Regional Head is a strategic component in striving to realize quality services, both in internal services within the organization and in external services to the community. The leadership of the Regional Head who applies the patterns and strategies of listening, feeling, responding, and realizing the desires, aspirations, demands and interests of the community as well as the demands of the organization are the strengths in the effort to realize organizational goals and improve the life and welfare of the community

Keywords: *Leadership, Regional Heads, and AURA Strategy*

PENDAHULUAN

Sangat beralasan jika setiap Kepala Daerah pemerintahan menguasai ilmu dan seni memimpin, terutama bagaimana mereka menyusun pola kegiatan yang efektif, bagaimana menerapkan pola-pola kekuasaan yang tepat dari segi waktu dan tindakan serta lingkungan, memiliki pola perilaku kepemimpinan yang dapat menggerakkan pegawai dan masyarakat sehingga

mencapai tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan masyarakat.

Penyusunan pola kegiatan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah, agar tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya bersifat rutinitas, seremonial, dan protokoler dalam keseharian Kepala Daerah dapat berlangsung secara teratur, seimbang dan mampu melayani kepentingan

serta kebutuhan pegawai dan masyarakat.

Penguasaan seni dan ilmu kepemimpinan merupakan syarat mutlak bagi Kepala Daerah dikarenakan: pertama, kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat tertentu seperti kepribadian (personality), kemampuan (ability) dan kesanggupan (capability). Kedua, kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang terkait dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Ketiga, kepemimpinan adalah sebagai proses antarhubungan atau interaksi antara pemimpin, bawahan, dan situasi (Kaloh, 2009:9).

Pemahaman dan penguasaan ilmu kepemimpinan sangat membantu setiap pemimpin dalam membawa organisasi ke pencapaian tujuan, mengingat kepemimpinan mengandung keterampilan dalam diri pemimpin (Kaloh, 2009:10), antara lain:

1. Intuisi yaitu keterlibatan pemimpin dalam menatap situasi, mengantisipasi perubahan, mengambil

resiko, dan membangun kejujuran.

2. Pandangan yaitu keterlibatan pemimpin dalam mengimajinasikan suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi.
3. Nilai keselarasan yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya, nilai-nilai yang dimiliki bawahannya, serta dapat memadukan kesuanya nilai tersebut menuju organisasi yang efektif.
4. Kepastian akan maksud dan arah tujuan.

Kajian Pustaka Kepemimpinan

Menurut Stone dan Sachs (Kaloh, 2009:11) ada 4 (empat) hal strategi bagi pemimpin dalam memimpin organisasi, yaitu:

1. *Memberdayakan anggota organisasi*, Pemimpin yang dapat memberdayakan anggota organisasi adalah pemimpin yang memahami secara utuh keberadaan staf, mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang

dikemukakan dan diinginkan bawahannya, bersedia menjelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai, memberi kesempatan kepada staf untuk berkembang dan bersedia melatih staf untuk berpikir kritis.

2. *Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja*, Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja sekaligus lingkungan pelatihan adalah pemimpin yang mampu menyediakan lingkungan yang memungkinkan staf sambil bekerja juga dapat belajar dari kenyataan, lingkungan yang memungkinkan terbentuknya kelompok kerja yang saling membagi pengetahuan dan keterampilan dan saling memotivasi diantara staf sehingga seluruhnya mengalami kemajuan. Dalam menghadapi pegawai yang baru dimutasi atau pegawai yang baru maupun yang

lama, seorang pemimpin mampu melihat bahwa dengan permasalahan/kekuarangan yang ada pada staf secara keseluruhan dapat dirumuskan pelatihan yang sebaiknya diberikan. Pemimpin mengidentifikasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh staf.

3. *Mengupayakan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi menjadi milik anggota organisasi*, Pemimpin yang dapat menjelaskan visi dan tugas organisasi secara terus-menerus adalah pemimpin yang berupaya menjelaskan visi dan tugas organisasi sehingga dirasakan oleh staf sebagai miliknya. Pemimpin yang berusaha menjelaskan arah dan tujuan organisasi, peran masing-masing bagian dalam mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi bagian-bagian yang sering melakukan kegiatan secara tradisional, memahami apa

yang diinginkan staf dan menyadari paa yang perlu disempurnakan oleh pemimpin serta membuat rencana tindak lanjut guna mewujudkan tujuan organisasi.

4. *Membuka diri terhadap perkembangan dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan,* Pemimpin yang terbuka dan luwes adalah pemimpin yang tidak terikat pada tingkat, kedudukan, warna kulit, status dan lainnya tetapi semuanya berada dalam suasana kerja sama secara kekeluargaan/persahabatan di dalam suatu lingkup organisasi untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis di lingkungan kerjanya sehingga suasana lingkungan kerja tidak statis dan membosankan. Pemimpin yang bersedia menerima informasi dan melayani melalui komunikasi jarak jauh seperti penggunaan telepon. Berkaitan dengan perkembangan yang semakin pesat, setiap

pemimpin akan diperhadapkan dengan adanya teknologi baru. Dalam memberdayakan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi, setiap pemimpin harus terbuka dengan perkembangan dan menyesuaikan berbagai sarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pemberdayaan ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan staf dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 63

- 1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.
- 2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Dalam Pasal 65 adalah sebagai berikut:

1) Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. dihapus. (sebelumnya "mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah").

A. Strategi AURA

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Menurut Chandler (Rangkuti, 1997:3), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan panjang, program tindak lanjut, seta prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner

(Rangkuti, 1997:4), strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Menurut Rafiq (2018:219) ada 4 (empat) strategi AURA (*Authority, Used, Responsibility, dan Attitude*), yaitu:

1. *Authority* (kewenangan).

Dalam strategi *authority* yaitu adanya kewenangan Pemerintah Daerah yang jelas di mana, kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

2. *Used* (Sistem yang digunakan).

Strategi *Used* yaitu adanya sistem yang digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan, di mana adanya sistem yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara utuh dan menyeluruh.

3. *Responsibility* (tanggung jawab).

Strategi *responsibility* yaitu adanya tanggung jawab

yang penuh dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat.

4. *Attitude* (sikap).

Strategi *attitude* yaitu adanya sikap Pemerintah daerah yang terbuka, di mana Pemerintah Daerah memiliki sikap yang terbuka untuk mermuskan kebijaksanaan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.

PEMBAHASAN

Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam system pemerintahan sehingga seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif, dan komunikatif dengan menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun dengan pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah. Dengan kepemimpinan yang efektif dari Kepala Daerah melalui strategi

AURA (*Authority, Used, Responsibility, dan Attitude*) diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigm baru otonomi daerah.

Berdasarkan strategi AURA (*Authority, Used, Responsibility, dan Attitude*), maka mencari sosok kepemimpinan Kepala Daerah sebagai berikut:

1. *Authority* (kewenangan).

Kewenangan kepemimpinan Kepala Daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan dengan tujuan agar birokrasi Pemerintah Daerah selalu bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan membangun partisipasi sektor swasta. Selain itu Kepala Daerah dalam melaksanakan kepemimpinannya harus memiliki road map reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar

berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sehingga penguatan birokrasi pemerintah, terwujudnya penguatan dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. *Used* (Sistem yang digunakan).

Sosok seorang Kepala Daerah secara strategis mempunyai pengaruh penting dan menentukan dalam menciptakan keunggulan bersaing yang sangat dibutuhkan baik di dalam organisasi pemerintahan, organisasi swasta, maupun organisasi kemasyarakatan.

Melalui organisasi pemerintahan, Kepala Daerah mempunyai strategis memiliki kekuatan sistem yang bisa digunakan untuk memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja yang memfasilitasi kemudahan akses

melaui pelayanan kepada masyarakat.

Melalui organisasi swasta, mempunyai kekuatan untuk memperlakukan masyarakat sebagai asset yang berharga dibandingkan sebagai beban biaya karena masyarakat adalah human capital sebagai nilai ekonomi dari SDM yang terkait dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, inovasi, energy dan komitmennya. Di sisi lain, human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan individu dalam masyarakat untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Sehingga Kepala Daerah memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan orientasi baru dalam pengembangan masyarakat sebagai asset daerah serta mekanisme investasi daerah dalam human capital melalui pendidikan sebagai bentuk regenerasi calon-calon pemimpin masa depan.

Selanjutnya, melalui organisasi kemasyarakatan, memiliki kekuatan untuk dapat memfungsikan kemasyarakatan sebagai pengembangan dan

nilai tambah dalam pengembangan sarana kemampuan tenaga kerja yang tidak terlepas dari peran Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahannya dan membangun partisipasi sector swasta untuk mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan perekonomian local.

3. *Responsibility* (tanggung jawab).

Seorang Kepala Daerah memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN. Selain itu, Kepemimpinan Kepala Daerah diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang semakin maju, dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur Pemerintah Daerah semakin professional, dan mind-set serta culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

4. *Attitude* (sikap).

Seorang Kepala Daerah harus memiliki sikap terbuka yang merumuskan

kebijaksanaan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Seorang Kepala Daerah harus memiliki sikap responsive dalam menganggapi berbagai masalah yang berkembang di daerah sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.

Sikap terbuka dari Kepala Daerah menjadi cerminan kepemimpinannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat apabila diikuti oleh perbaikan kemampuan profesional dari aparatnya. Apabila profesionalitas aparat meningkat, maka akan sangat mampu Kepala Daerah untuk menjawab setiap masalah yang ada. Sehingga aparat akan dengan mudah mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

PENUTUP

Kepemimpinan Kepala Daerah dalam strategi *AURA*

(*Authority, Used, Responsibility, Attitude*) yaitu:

1. *Authority* (kewenangan).

Kewenangan Kepala Daerah dalam memimpin adalah strategi dalam menjalankan pemerintahannya bertujuan agar birokrasi Pemerintah Daerah selalu bisa menjalankan kerjanya dengan baik untuk melayani masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah dalam memberdayakan organisasinya yang mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi dengan menyusun kebijakan pembangunan melalui strategi kewenangan sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian Kepala Daerah dalam memimpin organisasi efektif, efisien serta tujuan yang diinginkan dalam melayani masyarakat terukur dan terintegrasi dan berkelanjutan. Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Kepala Daerah perlu

mengenai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat dengan menyelesaikan gejalanya.

2. *Used* (Sistem yang digunakan).

Kepala Daerah dalam memimpin menggunakan strategi sistem yang jelas digunakan sehingga kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara utuh dan menyeluruh serta menciptakan keunggulan yang bersaing baik dalam organisasi pemerintahan, organisasi swasta, dan organisasi kemasyarakatan.

Melalui organisasi pemerintahan, Kepala Daerah menciptakan lingkungan kerja dengan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang memfasilitasi kemudahan akses dalam melayani kepada masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah selalu organisasi pemerintahan, perlu memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu instrument administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat terutama dalam

menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat.

Melalui organisasi swasta, Kepala Daerah memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan orientasi masyarakat sebagai asset daerah dan dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuknya investasi yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam organisasi kemasyarakatan, Kepala Daerah mampu mengembangkan nilai tambah sarana kemampuan tenaga kerja melalui kemampuan intelektual, keahlian, dan perilaku keteladanan dalam hal intelektual dari seorang Kepala Daerah.

3. *Responsibility* (tanggung jawab).

Kepemimpinan seorang Kepala Daerah dalam strateginya mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dengan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga kesejahteraan

masyarakat terwujud. Tanggung jawab Kepala Daerah memiliki peluang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

4. *Attitude* (sikap).

Sikap terbuka dari Kepala dalam dengan strateginya bermanfaat bagi masyarakat apabila diikuti oleh perbaikan kemampuan professional para aparatnya. Apabila professional paratur meningkat, maka akan sangat mungkin Kepala Daerah dengan strategi sikap selalu mampu untuk menjawab setiap masalah yang ada. Sehingga aparat akan dengan mudah mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelayanan public, yaitu bagaimana dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. 2018. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Teori dan Prakteknya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kaloh, J. 2006. *Pemimpin, atara keberhasilan dan Kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
2009. *kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ndhara, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Purwoko, Bambang. 2018.
Manajemen
Pemerintahan Daerah
Otonom Baru.
Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

Rafiq, Aunur. 2018. Reformasi
Birokrasi. Malang:
media Nusa Creative.

Rangkuti, Freddy. 1997.
Analisis SWOT Teknik
Membedah Kasus
Bisnis. Jakarta:
Gramedia Pustaka
Utama

Rosidin, Utang, 2015. Otonomi
Daerah dan
Desentralisasi.
Bandung: Pustaka Setia.

Suradinata, Ermaya. 2014.
Analisis
Kepemimpinan Strategi
Pengambilan
Keputusan. Jatinangor:
Alqaprint.

Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan
Publik dan
Transparansi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Bandung: Alfabeta.

Soematri, Sri. 2014. Otonomi
Daerah. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Dokumen lain:

Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.